



Fatih Azza N<sup>1</sup>  
 Farid Setiawan<sup>2</sup>  
 Rio Saputra<sup>3</sup>  
 Ammaliyah Tri Yuliatin<sup>4</sup>  
 Muhamad Ilham<sup>5</sup>

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN

### Abstrak

Pendidikan merupakan salah satu ujung tombak kemajuan bangsa pada masa depan bangsa. Dalam pengembangan pendidikan Pendidikan Nasional, maka perlu adanya kebijakan yang menjadikan pendidikan lebih maju. Peran kebijakan sendiri sangat penting, karena bisa membantu seorang membuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melewati proses penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif- alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Dalam pembuatan kebijakan ini tentu adanya implementasi untuk melihat hasil dari kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan-kebijakan dalam pendidikan itu sendiri dengan melihat tahapan-tahapan dan pendekatan implementasi kebijakan pendidikan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendidikan

### Abstrak

Education is one of the spearheads of the nation's progress in the nation's future. In the development of National Education education, it is necessary to have policies that make education more advanced. The role of policy itself is very important, because it can help a person make decisions by providing information obtained through the research and analysis process, separating and clarifying problems, revealing mismatched goals and efforts, providing new alternatives and proposing ways to translate ideas into policies. policies that are easy to implement and implement. In making this policy, of course there is an implementation to see the results of the policy. This study aims to analyze the implementation of policies in education itself by looking at the stages and approaches of implementing educational policies.

Keywords: *Implementation, Policy, Education*

### PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat urgen bagi sebuah Negara. Sebab pendidikan menjadi sarana utama untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mampu mengoptimalkan potensi diri dan mampu mengelolanya secara maksimal dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pendidikan nasional yaitu mewujudkan sistem pendidikan guna meningkatkan pranata sosial

1.2.3.4.5 Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Email: Azanabila31@gmail.com, ammaliyahtriyuliatin15@gmail.com, mi1123644@gmail.com  
 rio1811031247@webmail.uad.ac.id

yang berwibawa dan kuat sehingga mampu memberdayakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan proaktif dalam memecahkan tantangan zaman yang berubah-ubah. Kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik yang mana suatu keputusan yang dibuat secara langsung oleh pihak tertentu. Kebijakan public adalah suatu keputusan yang mengatur dan mengelola sumber daya yang ada untuk kepentingan warga negaranya. Munculnya sebuah kebijakan disebabkan adanya permasalahan yang melatarbelakangi kebijakan tersebut, sehingga kebijakan sebagai pedoman atau strategi dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada.

Kebijakan adalah putusan yang di buat sedemikian rupa oleh sebuah lembaga atau aparatur negara yang berwenang baik itu lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, kebijakan itu di buat karena untuk melaksanakan tujuan negara. pengertian kebijakan di sini adalah dapat di putusan oleh pemerintah melalui hasil musyawarah dengan lembaga seperti ( eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk memajukan masyarakat karena kebijakan yang akan di putusan dapat merajai kehidupan bermasyarakat dari keseluruhan secara umum. Kebijakan yang baik dapat baermanfaat bagi banyak orang dan tidak merugikan banyak orang karena di dalam kebijakan di buat berdasarkan undang-undang yang sudah jelas adanya.

Implementasi kebijakan pendidikan menjadikan suatu hal yang penting sebab dengan tahap ini menjadikan kebijakan yang diberikan akan terlihat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Dengan implementasi kebijakan pendidikan nantinya bisa dilakukan tahap evaluasi untuk melihat kembali dari kebijakan yang diterapkan tersebut. Dalam implementasi ini juga perlu diperhatikannya tahapan-tahapan, pendekatan dalam implementasi kebijakan pendidikan.

Tujuan dari implementasi penelitian adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat terealisasi. Implementasi merupakan factor terpenting dalam dari sebuah kebijakan, proses implementasi kebijakna menjadi penentu akhir yang sangat penting atas keseluruhan pembuatan kebijakan , sebaagus apapun formulasi dan rumusan kebijakn yang dihasilkan, menjadi tidak berartri manakalah formulasi itu tidak dilanjutkan dengan proses implementasi.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan adalah terjemahan dari *policy*, yang bersumber dari bahasa Inggris. Kata *policy* dapat juga diartikan sebuah rencana dalam kegiatan yang di dalam nya berisikan tujuan-tujuan yang akan di ajukan serta di beri keputusan oleh pemerintah, partai politik dan yang lainnya. Secara kata etimology kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani yang berarti polis yang artinya kota. Kebijakan merupakan sebuah putusan yang di buat untuk sebuah lembaga atau aparatur negara yang bertanggung jawab baik di eksekutif ,legislatif dan yudikatif kebijakan di buat karena melaksanakan tujuan negara tersebut. Kebijakan disini adalah adanya putusan oleh pemerintah memalui hasil musyawarah dengan beberapa lembaga seperti (eksekutif, legislatif dan yudikatif) agar masyarakat bisa maju karenanya di ambillah kebijkan yang dapat di putusan dan memberikan jalan kehidupan bermasyarakat dari seluruh secara umum. Kebijakan yang baik ialah yang dapat bermanfaat untuk banyak orang dan tidak merugikan oleh banyak orang karena di dalam kebijakan di buat berdasarkan undang-undang yang jelas adanya. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan bagian proses untuk pembuatan kebijakan, yang ada seperti dinyatakan oleh (Hasbullah,2015) bahwasanya di dalam proses pembuatan kebijakan yang berlangsung dalam beberapa tahap pembuatan kebijakan politik dimana aktivitas politik yang sedang berlangsung dalam tahapan membuat kebijakan dan di visualkan sebagai serangkaian dari tahap yang saling mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain yang dapat di atur berdasarkan urutan waktu dan seperti penyusunan agenda, formulasi, adopsi dan implementasi kebijakan pendidikan mengilustrasikan secara rinci pada fase dan karakter pembuat kebijakan itu dan dimana implementasi adalah bagian yang ada di dalamnya. Di fase pertama merupakan penyusunan agenda ,karakter fase misalnya beberapa pejabat yang di pilih dan di angkat menempatkan adanya masalah pada publik. Di fase kedua merupakan formulasi kebijakan karakter di fase ini adalah pejabat yang merumuskan kebijakan untuk mengatasi semua masalah, yang di alternatifkan kebijakan dapat melihat ada perlunya membuat perintah eksekutif dan peradilan dan tingkatan legislatif. Di fase ketiga merupakan adopsi kebijakan, karakter misalnya unik pemeriksaan dan akuntansi di dalam pemerintahan yang menentukan badan eksekutif, yudikatif dan legislatif serta

peradilan fase yang keempat merupakan dari implementasi kebijakan karakteristik kebijakan yang di laksanakan oleh beberapa unit administrasi pada sumber finansial dan kemanusiaan. Fase yang terakhir merupakan penilaian kebijakan berkarakter di fase ini adanya unit pemeriksaan dan akutansi di dalam pemerintah dapat menentukan badan eksekutif,yudikatif dan legislatif serta peradilan yang memenuhi persyaratan di dalam undang-undang yang membuat implementasi kebijakan yang terbagi menjadi tiga tahap perumusan masalah dan tahap formulasi dan adoptasi kebijakan , dengan demikian penemuan ini dapat berkembang secara dinamis dengan adanya berbagai keragaman situasi dan kondisi yang di hadapi yang meliputi dari keagamaan stratifikasi kebijakan,jenis-jenis kebijakan dan lingkungan kebijakan (hassbuallah 2015).

## B. Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang menentukan sebuah kebijakan bersentuhan dengan stakeholder pendidikan serta dapatdi terima oleh masyarakat. implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan prosese yang kompleks. Dalam hal ini dapat diketahui bila dalam tahapan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan baik, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan inptimalisasinya,maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Hal ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan agar dalam evaluasi mendapatkan hasil yang sesuai dengan target.

Charles O Jones dalam gaffar memiliki tiga tahapan utama, yakni *organization, interpretation, and application*. pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya yang ada, unit-unit serta metode untuk menjalankan program yang sudah direncanakan. kedua, interpretasi, yaitu aktivitas sosialisasi dan pengarahan kebijakan agar program yang sudah direncanakan tepat dan dapat diterima serta dijalankan. ketiga, aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program yang nantinya menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan tersebut.

Dari beberapa ulasan di atas dapat ditarik disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan menjadikan kebijakan tersebut mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

## C. Pendekatan Impelementasi Kebijakan Pendidikan

Dalam implementasi kebijakan pendidikan ada beberapa pendekatan salah satunya, yaitu *top down* dan *bottom up* pendekatan *top down* yaitu pendekatan menurunkan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau makro. Pendekatan ini menjadikan pemerintah berperan besar untuk memberikan kebijakan. Kebijakan yang bersifat *top down* ini bersifat secara strategis, umum dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional, pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Pendekatan *bottom up*, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat). kebijakan ini diawali dari masyarakat melalui aspirasi, permintaan dan dukungan dari masyarakat. implementasi kebijakan berusaha untuk menyampaikan harapannya dan permasalahan yang dihadapi.pendekatan yang berkenaan dengan *bottom up* biasanya berkenaan dengan hal-hal yang tidak menyangkut masalah keamanan nasional, kebijakan ini berfokus kepada hal-hal seperti alat- alat kontrasepsi, padivarietas unggul, pengembangan ekonomi nelayan dan lain sebagainya yang berfokus pada satu bidang yang menjadi masalah yang dihadapi.

## SIMPULAN

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy*” yang berasal dari bahasa Inggris. Kata *policy* diartikan sebuah rencana kegiatan yang memuat tujuantujuan untuk diajukan dan diberi keputusan oleh pemerintah, partai politik, dan lainlain. Secara etimologi kata kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani “Polis” yang berarti kota (city).Kebijakan adalah putusan yang di buat sedemikian rupa oleh sebuah lembaga atau aparatur negara yang berwenang baik itu lembaga

eksekutif, legislatif dan yudikatif, kebijakan itu di buat karena untuk melaksanakan tujuan negara. pengertian kebijakan di sisni adalah dapat di putuskan oleh pemerintah melalui hasil musyawarah dengan lembaga seperti ( eksekutif, legislatif dan yudikatif) untuk memajukan masyarakat karena kebijakan yang akan di putuskan dapat merajai kehidupan bermasyarakat dari keseluruhan secara umum. Kebijakan yang baik dapat baermanfaat bagi banyak orang dan tidak merugikan banyak orang karena di dalam kebijakan di buat berdasarkan undan-undang yang sudah jelas adanya. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan bagian dari proses pembuatan kebijakan (*policy making process*). Seperti dinyatakan Hasbullah, bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktivitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, yang mengatur berdasarkan urutan waktu seperti penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Dalam implementasi kebijakan pendidikan ada beberapa pendekatan salah satunya, yaitu *top down* dan *bottom up* pendekatan *top down* yaitu pendekatan menurunkan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau makro. Pendekatan ini menjadikan pemerintah berperan besar untuk memberikan kebijakan. Kebijakan yang bersifat *top down* ini bersifat secara strategis, umum dan berhubungan dengan keselamatan negara, seperti kurikulum pendidikan, pembiayaan pendidikan nasional, pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Pendekatan *bottom up*, yaitu pendekatan yang berasal dari bawah (masyarakat).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Syafaruddin, *Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*, (Jakart: Rineka Cipta, 2008),
- Elih Yuliah, *Implementasi Kebijakan Pendidikan*, Jurnal at-Tadbir Media Hukum dan Pendidikan ( Jawa Barat : Pengawas Sekolah di Kementrian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ) Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020,
- H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Warni T Sumar “*Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis Eksploratif dan Aplikatif*”,